

PEMERINTAH BEBASKAN PPN SEWA TOKO PUSAT PERBELANJAAN

Sejumlah kios tutup di Mal Tangcity, Kota Tangerang, Banten, Rabu (4/8). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan terkait pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penyewaan toko atau bangunan usaha kepada pedagang eceran pada periode penyewaan Agustus hingga Oktober 2021.



Peluang Pasar Besar, Kemenperin Fokus Bangun Ekosistem Industri Game Nasional

“Dalam membangun ekosistem industri konten yang baik, dibutuhkan kolaborasi dan interaksi antar-sektor. Industri berbasis *Intellectual Property* (IP) dapat saling berkolaborasi dalam pengembangan produk dan IP dengan dukungan investasi baik dari pihak pemerintah maupun swasta,” kata Taufiek Bawazier.

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri game dalam negeri agar bisa lebih berdaya saing di kancah global. Langkah strategis ini perlu dibangun ekosistem industri yang baik melalui penguatan rantai nilai (*value chain*) dan pengoptimalan potensi yang ada di tanah air.

“Dengan memperhatikan rantai nilai industri, akan menghasilkan sebuah ekosistem yang terintegrasi dan menyeluruh,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier pada webinar Bangsa Game Buatan Indonesia, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Rabu (4/8).

Taufiek menjelaskan, pihaknya telah berupaya untuk menguatkan rantai nilai di industri konten yang melibatkan beberapa sektor pendukung, antara lain industri komik, animasi, film, game, musik, dan mainan. Kemenperin juga proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, BUMN

dan pihak swasta. “Dalam membangun ekosistem industri konten yang baik, dibutuhkan kolaborasi dan interaksi antar-sektor. Industri berbasis *Intellectual Property* (IP) dapat saling berkolaborasi dalam pengembangan produk dan IP dengan dukungan investasi baik dari pihak pemerintah maupun swasta,” tuturnya.

Taufiek optimistis, dengan terbentuknya ekosistem industri konten yang baik, industri games sebagai salah satu komponen pendukung di dalamnya juga akan turut tumbuh dan berkembang dengan baik. “Apalagi, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Newzoo pada tahun 2016-2019, revenue industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, Indonesia memperoleh pendapatan sebesar USD1,084 miliar dari industri gaming dan eSports.

“Dengan capaian tersebut, saat ini Indonesia merupakan pasar industri game terbesar

di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-17 dunia. Tercatat pula terdapat 52 juta penduduk Indonesia yang merupakan *gamer*,” ungkapnya.

Menurut Taufiek, dengan potensi pasar yang begitu besar di Indonesia, pihaknya mendorong para pengembang game dalam negeri untuk mengoptimalkan peluang yang ada saat ini. “Sebab, di tahun 2020, pasar game Indonesia baru

dikuasai oleh industri lokal senilai 0,4%. Artinya, masih tinggi untuk peluang berusaha bagi para pengembang game dalam negeri,” tegasnya.

Taufiek menambahkan, pada tahun 2016, perangkat yang paling digemari untuk memainkan game masih didominasi oleh komputer (baik desktop maupun laptop), namun tren tersebut semakin berubah pada saat ini.

“Tren gamer di Indonesia yang menggunakan komputer sebagai perangkat permainannya mengalami penurunan, dari 39,2% tahun 2017 menjadi 35,4% pada 2018. Sedangkan gamer yang menggunakan *smartphone* sebagai perangkatnya terus naik, dari 29,9% tahun 2017 menjadi 33,5% di 2018,” kata Taufiek. • pan

Sri Mulyani Sebut Empat Elemen Penting untuk Hindari Middle Income Trap

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penyediaan infrastruktur, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi merupakan empat elemen penting bagi suatu negara agar mampu menghindari dari *middle income trap*.

Hal ini ia jelaskan saat menjadi pembicara kunci pada acara webinar peringatan HUT CSIS bertajuk “50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045”, secara daring pada Rabu (4/8).

“Indonesia saat ini adalah *middle income country*. Dan kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini mayoritas mereka berhenti di *middle income country*. Artinya ada fenomena yang disebut *middle income trap*,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebut, tidak banyak negara di dunia ini yang bisa menembus jebakan itu. Kurang dari 20 negara yang bisa melompat dari *middle income country* ke *high income country*. Maka hal ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia agar lebih siap menghadapinya.

“Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia identik dengan negara yang terus meningkatkan produksi dan inovasi. Itu adalah fungsi untuk naik menjadi *high income country*,” ujarnya.

Penyiapan SDM yang berkualitas itu meliputi pendidikan, kesehatan dan jami-

nan sosial. Ia mengatakan bahwa APBN menaruh perhatian besar pada tiga hal itu. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan suatu bukti komitmen perhatian pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cerdas, berwawasan luas dan berpendidikan.

Bidang kesehatan dan jaminan sosial juga mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Pada saat pandemi ini, anggaran kesehatan meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan. Selain itu, jaminan sosial juga dilakukan melalui berbagai program prioritas.

Selanjutnya, elemen kedua untuk menghindari *middle income trap* adalah infrastruktur. Sri Mulyani pada kesempatan itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas baik. Disamping itu, tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan juga penting dalam upaya pembangunan infrastruktur tersebut.

Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah mulai dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.

“Kami telah melakukan banyak hal di Kementerian Keuangan dalam mendesain KPBU ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menghasilkan beberapa *special mission vehicle* seperti PT. SMI dan PT. PII yang memberikan penjaminan

pinjaman dan bahkan technical assistant pada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifatnya KPBU,” tambah Sri Mulyani.

Ketiga, ia menyebut bahwa negara yang bisa menembus *middle income trap* adalah negara yang memiliki institusi yang efisien, lincah dan memiliki performa bagus berdasarkan tata kelola yang baik. Maka, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi.

“Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah kasat mata oleh masyarakat, namun memiliki dampaknya luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik, efisien, ataukah masyarakat dan dunia usaha tidak diberati oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien,” tambah dia.

Terakhir, transformasi ekonomi menjadi elemen keempat untuk menghindari *middle income trap*. Transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang berbasis digital, mengedepankan efisiensi dan produktivitas dengan regulasi yang simpel serta kompetitif adalah hal yang ingin dibangun di Indonesia.

Ia menyebut, kemudahan berusaha juga terus diperbaiki termasuk berbagai hal yang utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan transparan. • dot

Laba Bank Permata Rp639 Miliar

JAKARTA (IM) - PT Bank Permata Tbk membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp639 miliar pada kuartal II-2021. Angka ini meningkat signifikan 74,3 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp366 miliar.

Direktur Utama PermataBank, Chalit Tayjasanant mengungkapkan, pertumbuhan ini ditopang oleh penerapan strategi usaha berkesinambungan secara pruden dan konsisten.

Perseroan juga terus menjaga kualitas aset pada level yang aman serta memelihara posisi likuiditas dan permodalan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Meskipun keadaan perekonomian Indonesia belum kembali seperti prapandemi, strategi bisnis yang kami jalankan dan dukungan para nasabah kami mampu mencetak hasil memuaskan di tengah tahun 2021,” kata Chalit dalam siaran pers, Rabu (4/8).

Perseroan juga mencatat total aset yang bertumbuh sebesar 34,8 persen YoY menjadi sebesar Rp212,9 triliun. Sementara penyaluran kredit tumbuh 16,6 persen YoY menjadi sebesar Rp120,8 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit, didorong oleh pertumbuhan kredit segmen *wholesale banking* sebesar 39,8 persen YoY yang dikontribusikan dari penyelesaian integrasi dengan Bangkok Bank Indonesia di bulan Desember 2020. Selain itu juga ditopang oleh pertumbuhan KPR yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,7 persen YoY di segmen ritel.

“Perluasan skala bisnis dan pertumbuhan kredit sehat, baik secara organik maupun inorganik, tetap menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja PermataBank saat ini. Kami berharap dapat terus mendukung ekosistem perbankan Indonesia menuju ke arah yang lebih kuat,” jelas Chalit.

Sementara itu pendapatan operasional perseroan kuartal II 2021 tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau tumbuh sebesar 19,4 persen YoY pada kuartal II tahun 2021. Demikian juga dengan laba operasional sebelum pencadangan tumbuh sebesar 36,6 persen YoY.

Rasio NPL gross dan NPL net di bulan Juni 2021 masing-masing 3,3 persen dan 1,2 persen, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2020 masing-masing sebesar 2,9 persen dan 1 persen.

Namun, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan posisi Juni 2020 masing-masing sebesar 3,7 persen dan 1,8 persen. PermataBank juga mengalokasikan biaya pencadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas aset sebesar Rp1,5 triliun atau meningkat 41 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Dalam hal pencadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan, Bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dampak pandemi yang masih berlanjut yang secara tidak langsung menyebabkan potensi peningkatan risiko kredit inheren,” ujar Chalit. • dot



REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Petugas memotret warga penerima beras bantuan sosial tunai (BST) di Cikukur, Lebak, Banten, Rabu (4/8). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi anggaran program perlindungan sosial mencapai Rp91,84 triliun atau 48,89 persen dari total anggaran sebesar Rp187,84 triliun.

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

SLI 01019
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Wappon Hemat Ke Luar Negeri
suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6 an./detik

Tekan Kode Akses 01019 dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 47 50 369

PLTA Kayan 9.000 MW Diproyeksi Selesai 2024

JAKARTA (IM) - Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan Cascade di proyeksi selesai tepat waktu pada 2024. Maka, PLTA yang terletak di Kalimantan Utara ini terus dikebut selama masa pandemi.

Proyek yang dikembangkan PT Kayan Hydro Energy (KHE) sejak tahun 2011 itu masuk dalam kawasan industri hijau. KHE merupakan inisiator proyek PLTA yang terdiri atas lima Cascade di Sungai Kayan, Kecamatan Long Pesu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Direktur Operasional KHE Khaeroni menjelaskan, proyek tersebut menelan investasi hingga US\$17,8 miliar. Pada 31 Oktober 2018, KHE juga telah menandatangani kontrak engineering, procurement, and construction (EPC) dengan Sinohydro Corporation Limited, yang merupakan salah satu pembangun terbesar PLTA di dunia.

“Target PLTA Kayan sesuai perencanaan awal, yaitu konstruksi selesai tahun 2024 dan tahap commercial operation date (COD) tahun 2025,” jelas Khaeroni dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Khaeroni berharap proyek pembangunan PLTA berkapasitas 9.000 MW ini berjalan optimal sehingga nantinya sumber daya listrik yang besar ini dapat terintegrasi dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Kami sudah mendapatkan izin untuk kawasan industri. Tahun ini kami melakukan pembebasan lahan sekitar 1.500 hektar dan akan dilanjutkan hingga mencapai 5.000 hektar,” kata Khaeroni.

Ia menambahkan, pada tahun ini KHE menyiapkan infrastruktur penunjang proyek. KHE telah melakukan pekerjaan pembuatan jalan dari jalan pemerintah daerah menuju PLTA Kayan Cascade sepanjang 11,2 kilometer. KHE juga telah melakukan pengiriman peralatan proyek dan pembangunan gudang penyimpanan bahan peledak untuk memudahkan pekerjaan.

Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya merupakan inisiator proyek PLTA yang terdiri atas lima Cascade di Sungai Kayan, Kecamatan Long Pesu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. • hen

Realisasi Penerimaan PPN PMSE Rp2,2 Triliun

JAKARTA (IM) - Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kemenkeu melaporkan, pada akhir Juli 2021, realisasi penerimaan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terkumpul sebesar Rp2,2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menyebutkan, pemungutan PPN PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

“DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang dilakukan sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN,” kata Neil di Jakarta, Rabu (4/8).

Ia mengatakan, DJP terus menjalin komunikasi dengan

sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Hal itu dilakukan agar jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

DJP telah menunjuk enam perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai PPN PMSE atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Enam pelaku usaha tersebut yakni Shutterstock, Inc., Shutterstock Ireland Ltd., Fenix International Limited, Bold L.L.C, High Morale Developments Limited, dan Aceville Pte Ltd.

Neil mengatakan dengan penambahan enam perusahaan tersebut, maka pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 81 badan usaha. “DJP terus melakukan pengawasan secara intensif kepada Pemungut PPN PMSE,” kata Neil. • dro